



TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG :

MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF INDONESIA (MPTT-I)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kajian-kajian terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat berkembang dengan pesat;
 - b. bahwa kajian salah satu cabang ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat adalah kajian tauhid tasawuf;
 - c. bahwa kajian dan pensyarahannya kitab tauhid tasawuf telah menimbulkan keresahan dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat;
 - d. bahwa kericuhan sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah kabupaten/kota dipicu oleh kajian Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah;

- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
 6. Pendapat Ulama;

Mengingat Juga :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam;
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;

6. Qanun Aceh...

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/973/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
12. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 tahun 2011 tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-Kitab Tauhid Yang Muktabarah di Aceh;
15. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan kegiatan Sosial Keagamaan lainnya Dalam Kondisi Darurat;
16. Surat Menteri Agama RI Nomor : 403/Dt.III.III/HM.0I/08/2020 tanggal 1 September 2020 perihal tanggapan atas Literatur Tasawuf;
17. Surat Majelis Ulama Indonesia Nomor : 306/LPBKI-MUI/IX/2020 Tanggal 20 September 2020 perihal hasil Pengkajian;
18. Surat Aliansi Ormas Islam Aceh tentang Pernyataan Sikap Aliansi Ormas Islam Aceh Terkait Kajian MPTT.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah.
 2. Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan FORKOPIMDA Abdyta tanggal 24 September 2020.
 3. Surat Gubernur Aceh Nomor 451/13254 Tanggal 10 september 2020 tentang MPTT-I Aceh.
 4. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 12 Safar 1442 H bertepatan dengan 29 September 2020 M.

dengan...



dengan
bertawakkal kepada Allah SWT.
PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menghentikan semua kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang diasuh oleh Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Safar 1442 H
29 September 2020 M

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh



Ketua,

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni